

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG NO 7 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN
UMUM (STUDI KASUS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
TAMAN TEPI LAUT KOTA TANJUNGPINANG)**

Oleh:

**Wilda Gustina Putri
NIM. 180563201077**

ABSTRAK

Pedagangan kaki lima yang berada di tepi Laut Kota Tanjungpinang menjadi konsen dan prioritas Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk ditertibkan, karena menjadi permasalahan serius, dapat mengganggu ketertiban, keindahan Kota Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan mendisripsikan Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima yang berada di Taman Tepi Laut Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan proses pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan penelitian adalah teori menurut Edward III yang mengemukakan 4 komponen yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan suatu kebijakan yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi serta Birokrasi. Hasil penelitian ini berdasarkan indikator komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan kepada pedagang kaki lima sudah baik. Namun, kepatuhan dari pedagang kaki lima di lapangan yang masih sangat kurang. Sedangkan dalam hal sumberdaya dapat dikatakan juga belum efektif hal ini dikarenakan belum mencukupinya jumlah tenaga kerja, finansial maupun sarana dan prasarana. Disposisi/sikap para implementor dikatakan sudah sesuai dengan tuntutan/SOP dari pembuat kebijakan. Dan, Struktur Birokrasi yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah (PERDA) No 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Kesimpulan penataan pedagang kaki lima yang berada di Taman Tepi Laut Kota Tanjungpinang masih belum berjalan dengan efektif hal ini disebabkan komunikasi yang masih belum optimal serta sumberdaya yang belum mencukupi, perlu dilakukan pendekatan komunikasi yang terpadu seluruh stakeholder.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION POLICY NUMBER 7
OF 2018 CONCERNING PUBLIC ORDER (CASE STUDY OF STREET
VENDOR ARRANGEMENT IN TAMAN TEPI LAUT TANJUNGPINANG
CITY)**

By
Wilda Gustina Putri
NIM. 180563201077

ABSTRACT

Street vendors located on the edge of Tanjungpinang City Sea are the concern and priority of the Tanjungpinang City Government to be regulated, because they are a serious problem, can disrupt order, the beauty of Tanjungpinang City. This study aims to answer and describe the Implementation of the policy for arranging street vendors located in Tanjungpinang City Seaside Park as stated in Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning Public Order. This research method uses a qualitative descriptive approach with a data collection process through observation, interviews, and documentation. The theory used in the study is the theory according to Edward III which states 4 components that influence the success or failure of implementing a policy, namely: Communication, Resources, Disposition and Bureaucracy. The results of this study based on communication indicators carried out by policy makers to street vendors are good. However, compliance from street vendors in the field is still very lacking. While in terms of resources, it can be said that it is also not effective because the number of workers, finances and facilities and infrastructure is not sufficient. The disposition/attitude of the implementers is said to be in accordance with the demands/SOPs of policy makers. And, the Bureaucratic Structure owned by the Tanjungpinang City Trade and Industry Service has been stipulated in Regional Regulation (PERDA) No. 7 of 2018 concerning Public Order. The conclusion is that the arrangement of street vendors in the Tanjungpinang City Seaside Park has not been running effectively, this is due to communication that is still not optimal and resources that are not sufficient, an integrated communication approach is needed for all stakeholders.

Keywords: policy implementation, arrangement, street vendors